

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Hamzah, M. G. (2023). *Peradilan Modern*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.

Ismoyo, J. D., Apriyanto, A., Harryanti, T., & Judijanto, L. (2025). *Teori Negara Hukum Modern*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Khairudin, Soewito, Aminah, (2021), “Potret Kepercayaan Publik, Good Governance dan E-Government di Indonesia”, Banyumas : CV. Amerta Media, Hal. 13.

Mahkamah Agung, (2022), ”Buku Panduan Sistem Elektronik Berkas Pidana Terpadu”, Development MA RI, Ver.2, Hal: 241.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, (2011), “ Perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara dan Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara Dilihat dari Beberapa Sudut Pandang”, Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan, Hal : 11.

Mendrofa, S. A., Yuliana, S., Mustanir, A., Oktaviane, D. P., Anita, D., Hakim, L., ... & Kusnadi, I. H. (2024). *Good Governance Melalui Publik Digital*. Cirebon: Mega Press Nusantara.

Sulila, I. (2015). *Implementasi dimensi layanan publik dalam konteks otonomi daerah*. Yogyakarta: Deepublish.

Soerjono Soekanto, (2008), “ *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hal: 08.

Zein, M. H. M. (2023). *Reformasi birokrasi: Dunia birokrasi dan pemerintahan*. Serang: Sada Kurnia Pustaka.

## **B. Undang – Undang dan Peraturan Lainnya**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601. Jakarta.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 238/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pelaksanaan Uji coba Implementasi E- Berpadu di Lingkungan Pengadilan Negeri.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239/KMA/SK/VIII/2022 tentang Mengenai Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana Terpadu Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan  
Transaksi Elektronik

### **C. Jurnal**

Ade, Elwi, Andes, (2024), “ Efektivitas Sistem *E-Berpadu* dalam Perkara  
Pidana Sebagai Upaya Mewujudkan Peradilan Cepat”, *UNES Law  
Review*, Vol.6, No.3, Hal 9281.

Adhar Hakim, (2015).” Fungsi dan Peran Ombudsman Republik Indonesia  
Perwakilan Nusa Tenggara Barat Dalam Mendorong Kepatuhan  
Pemerintah Daerah Terhadap undang – Undang Nomor 25 Tahun  
2009 tentang Pelayanan Publik.”., *Jurnal IUS.*, Vol:3., No.7., Hal: 5.

Ellya Rosana, (2011), “ Modernisasi dan Perubahan Sosial”, *Jurnal  
TAPIS*, Vol.7., No.1., Hal: 33.

Eviva, dkk., (2020), “Penerapan Sistem Merit dalam Birokrasi Indonesia  
Untuk Mewujudkan Good Governance, *Jurnal Ilmiah Ilmu  
Administrasi.*, Vol.3., No.2., Hal: 144.

Gabriela, dkk, (2023), “ Efektivitas Penerapan Aturan Pelaporan Harta  
Kekayaan Penyelenggara Negara Sebagai Upaya Pencegahan  
Tindak Pidana Korupsi”, *Lex Administration*, Vol.11., No. 4., Hal:  
553.

Ipan Nurhidayat, (2023), “ Prinsip-Prinsip Good Governance di Indonesia” , Jurnal E-Gow Wiyata: Education and Government, Vol. 1, No.1, Hal: 46

Kornelus, Azhar , (2020), ”Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer”, Jurnal Gema Keadilan, Vol.7, No.1, Hal: 24.

Nindya, dkk, (2023), “ Penerapan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Binjai”, Journal of Academic Literatur Review, Vol.2., No.6., Hal: 454

Rinsofat, dkk, (2021), “Peranan Mahkamah Agung Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman”, Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen, Vol.02, No.02, Hal : 204.

Kornelus, Azhar , (2020), ”Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer”, Jurnal Gema Keadilan, Vol.7, No.1, Hal: 24.

Nindya, dkk, (2023), “ Penerapan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Binjai”, Journal of Academic Literatur Review, Vol.2., No.6., Hal: 454

Rinsofat, dkk, (2021), “Peranan Mahkamah Agung Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman”, Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP

Nommensen, Vol.02, No.02, Hal : 204.

Sheyla Nichatus Sovia, dkk, (2022), "Ragam Metode Penelitian Hukum".

Lembaga Studi Hukum Pidana, Hal: 25.

Zuhda Fitriana, dkk, (2021), "Implementasi Prinsip Partisipatif dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Jabung, Kabupaten Lamongan)", Jurnal Dedikasi Hukum, Vol.1., No.3., Hal: 277.

#### **D. Website**

Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung, (2015)  
[https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com\\_attachments&task=download&id=125](https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachments&task=download&id=125) "Roadmap Rencana Pengembangan Sistem Penelusuran Informasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015-2019", diakses pada, 16 Desember 2024 pukul 18.49 WIB.

Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung, (2018),  
<https://badilum.mahkamahagung.go.id/berita/berita-kegiatan/2614-mahkamah-agung-ri-meresmikan-aplikasi-e-court.html> ,"  
 Mahkamah Agung RI Meresmikan Aplikasi e-Court"  
 diakses pada 15 Desember 2024 pukul 23.09 WIB.

Kepaniteraan Mahkamah Agung, (2023), "Pembaruan Teknis dan Manajemen Perkara dalam Perma 8 Tahun 2022"  
<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur->

[berperkara/2142\\_inilah-pembaruan-teknis-dan-manajemen-perkara-dalam-perma-8-tahun-2022](#), diakses pada tanggal 20 November pukul 18.56 WIB.

Mahkamah Agung, (2023), “*E-Berpadu* Mahkamah Agung Republik Indonesia”, <https://eberpadu.mahkamahagung.go.id/> , diakses pada tanggal 19 November 2024 pukul 08.25 WIB.

Pemerintah Kota Tebing Tinggi, (2024), ” Memahami Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai Modal Pengetahuan Aparatur Sipil Negara di Kota Tebing Tinggi”, <https://www.tebingtinggikota.go.id/berita/artikel/memahami-pelaksanaan-sistem-pemerintahan-berbasis-elektronik-spbe-sebagai-modal-pengetahuan-aparatur-sipil-negara-di-kota-tebing-tinggi>, diakses pada tanggal 20 November 2024 pukul 10.15 WIB.

SIPP Menpan, (2023), ), <https://sippn.menpan.go.id/berita/89154/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-tanjung/perbedaan-peradilan-umum-dan-peradilan-khusus> diakses 16 Desember 2024 pukul 18.37 WIB.

## **E. Artikel**

Kompas.tv, (2022), “Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Sosialisasi E- Berpadu”, <https://www.kompas.tv/video/359301/penandatanganan-nota-kesepahaman-dan-sosialisasi-e-berpadu-ma-news> diakses pada tanggal 19 November 2024 pukul 09.34 WIB.

**F. Lain – Lain**

Wawancara, Ibu Poedji Oetami selaku Panitera Pengganti (PP) di  
Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 08 Mei 2025

Wawancara, Ibu Mustika S. Wijayanti selaku Petugas Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu (PTSP) Meja Pidana di Pengadilan Negeri Bojonegoro  
pada tanggal 08 Mei 2025